



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 24 /M.PPN/HK/03/2022

TENTANG

PENETAPAN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diatur Arsitektur SPBE Instansi Pusat ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pusat masing-masing;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diatur Arsitektur dan Peta Rencana SPBE ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diatur setiap Instansi Pusat bertugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di instansinya masing-masing;
 - d. bahwa dalam rangka melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan panduan dalam melaksanakan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
- PERTAMA : Menetapkan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEDUA : Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA disusun sebagai dokumen panduan untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

KETIGA : ...

- KETIGA : Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 24/M.PPN/HK/03/2022
TANGGAL 22 MARET 2022

ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Perpres SPBE, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk selanjutnya disebut Kementerian, menyusun Arsitektur SPBE Kementerian dengan mengacu pada Arsitektur SPBE nasional. Untuk itu dalam penyusunannya Arsitektur SPBE Kementerian dibangun dan dikembangkan selaras dengan Arsitektur SPBE nasional. Keselarasan dilakukan melalui penggunaan referensi arsitektur. Selanjutnya Arsitektur SPBE Kementerian disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan menjadi dasar untuk:

1. Penyusunan Proses Bisnis Kementerian;
2. Penggunaan data dan informasi Kementerian;
3. Pembangunan Infrastruktur SPBE Kementerian;
4. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus Kementerian;
5. Penerapan Keamanan SPBE Kementerian;
6. Penerapan integrasi Layanan SPBE Kementerian;
7. Penyusunan Peta Rencana SPBE Kementerian;
8. Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Kementerian.

Arsitektur SPBE Kementerian dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Reviu Arsitektur SPBE Kementerian dilakukan berdasarkan:

1. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
2. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian; dan
3. perubahan pada Unsur SPBE Kementerian atau perubahan rencana strategis Kementerian untuk Arsitektur SPBE Kementerian.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya Arsitektur SPBE Kementerian adalah untuk mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi Kementerian.

Sedangkan tujuan dari disusunnya Arsitektur SPBE Kementerian memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan pemerintah yang terpadu Kementerian.

BAB II ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan dan Strategi SPBE Kementerian

Selaras dengan arah kebijakan dan strategi SPBE Nasional, arah kebijakan dan strategi SPBE Kementerian melingkupi Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE, TIK, dan sumber daya manusia SPBE Kementerian.

1. Tata Kelola SPBE Kementerian

Diarahkan untuk perbaikan Tata Kelola SPBE Kementerian dengan melakukan penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE Kementerian dan kebijakan SPBE Kementerian untuk mewujudkan SPBE Kementerian yang terpadu dan menyeluruh. Perbaikan tata kelola dicapai melalui pembentukan tim koordinasi SPBE Kementerian, pembangunan Arsitektur SPBE Kementerian, penyederhanaan dan pengintegrasian Proses Bisnis pemerintahan di Kementerian, dan penyusunan kebijakan SPBE Kementerian yang terpadu. Inisiatif strategis dari kegiatan Tata Kelola SPBE Kementerian dilaksanakan dengan tahapan berikut:

- a. Pembangunan Arsitektur SPBE Kementerian;
- b. Pembentukan dan penguatan kapasitas Tim Koordinasi SPBE Kementerian, sebagai penyelenggara SPBE Kementerian;
- c. Penguatan kebijakan SPBE Kementerian;
- d. Pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan SPBE Kementerian;
- e. Perencanaan dan penganggaran SPBE Kementerian berbasis Arsitektur SPBE Kementerian; dan
- f. Penyelenggaraan manajemen perubahan SPBE Kementerian.

2. Layanan SPBE Kementerian

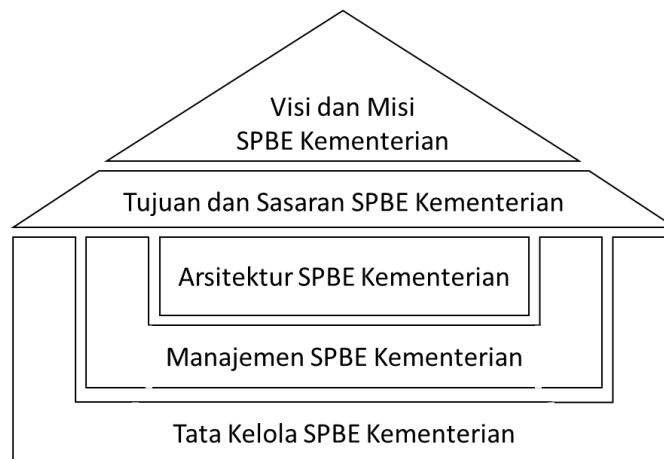
Diarahkan untuk peningkatan kualitas layanan pemerintah di tingkat kementerian dengan melakukan pengembangan layanan yang berorientasi kepada pengguna, terintegrasi, dan berkesinambungan. Inisiatif strategis dari kegiatan Layanan SPBE Kementerian berupa:

- a. pelaksanaan survei pengguna SPBE Kementerian;
- b. pemanfaatan portal pelayanan publik yang terintegrasi;

- c. pemanfaatan portal pelayanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi; dan
 - d. penyelenggaraan manajemen layanan Kementerian.
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Penyelenggaraan TIK Kementerian diarahkan untuk pengintegrasian TIK Kementerian dengan melakukan pengintegrasian data dan informasi di tingkat Kementerian, Aplikasi SPBE Kementerian, dan Infrastruktur SPBE Kementerian. Inisiatif strategis dari TIK Kementerian berupa:
- a. penyediaan pusat data Kementerian;
 - b. penyediaan Jaringan Intra Kementerian;
 - c. penyediaan Sistem Penghubung Layanan Kementerian;
 - d. penyediaan akses berkualitas terhadap Layanan SPBE Kementerian;
 - e. pengembangan layanan berbasis teknologi layanan berbagi pakai Kementerian;
 - f. pemanfaatan portal data nasional;
 - g. pembangunan sistem keamanan informasi Kementerian;
 - h. pemanfaatan teknologi analitika data untuk pengambilan keputusan yang cepat dan akurat; dan
 - i. penyelenggaraan manajemen TIK SPBE Kementerian.
4. Sumber Daya Manusia SPBE Kementerian
- Sumber daya manusia SPBE Kementerian diarahkan dengan melakukan pengembangan kepemimpinan SPBE Kementerian serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kementerian. Pengembangan sumber daya manusia SPBE Kementerian dapat dicapai melalui peningkatan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE Kementerian, pembangunan budaya kerja berbasis SPBE Kementerian, pengembangan jabatan fungsional, dan pelaksanaan kemitraan dengan berbagai pihak. Inisiatif strategis dari kegiatan sumber daya manusia SPBE Kementerian berupa:
- a. promosi literasi SPBE Kementerian;
 - b. peningkatan kapasitas ASN penyelenggara SPBE Kementerian;
 - c. pemanfaatan forum kolaborasi SPBE Nasional; dan
 - d. penyelenggaraan Manajemen SPBE Kementerian.

B. Kerangka Kerja SPBE Kementerian

Kerangka kerja SPBE Kementerian pada dasarnya merupakan sebuah struktur yang dirancang untuk melaksanakan SPBE Kementerian. Kerangka kerja SPBE Kementerian tersusun dari visi, misi, tujuan dan sasaran SPBE Kementerian, serta Tata Kelola SPBE Kementerian, Manajemen SPBE Kementerian, dan Arsitektur SPBE Kementerian.



Gambar 2.1. Kerangka Kerja SPBE Kementerian

1. Visi SPBE Kementerian

Terwujudnya sistem Kementerian yang terpadu dan menyeluruh untuk menghasilkan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel.

2. Misi SPBE Kementerian

Untuk mencapai visi SPBE Kementerian, misi SPBE Kementerian adalah:

- a. melakukan penataan dan penguatan organisasi dan Tata Kelola SPBE Kementerian yang terpadu;
- b. mengembangkan pelayanan Kementerian berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
- c. membangun fondasi TIK Kementerian yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
- d. membangun sumber daya manusia Kementerian yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

3. Tujuan SPBE Kementerian

Berdasarkan visi dan misi SPBE Kementerian, tujuan SPBE Kementerian adalah:

- a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di Kementerian.
- b. mewujudkan pelayanan Kementerian yang berkualitas dan terpercaya; dan
- c. mewujudkan SPBE Kementerian yang terpadu.

4. Sasaran SPBE Kementerian

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE Kementerian, sasaran SPBE Kementerian adalah:

- a. terwujudnya tata kelola dan Manajemen SPBE Kementerian yang efektif dan efisien;
- b. terwujudnya Layanan SPBE Kementerian yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
- c. terselenggaranya Infrastruktur SPBE Kementerian yang terintegrasi; dan
- d. meningkatnya kapasitas sumber daya manusia-SPBE Kementerian.

5. Tata Kelola SPBE Kementerian

Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kementerian yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta peningkatan pelayanan publik Kementerian yang berkualitas dan terpercaya dapat diwujudkan melalui Tata Kelola SPBE Kementerian. Tata Kelola SPBE Kementerian diterapkan untuk memastikan penerapan unsur SPBE Kementerian secara terpadu.

6. Manajemen SPBE Kementerian

Manajemen SPBE Kementerian adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE Kementerian yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta mendukung operasional layanan pemerintah di Kementerian yang berkualitas. Kualitas yang diharapkan tercapai dipastikan melalui pelaksanaan Audit TIK Kementerian secara berkala, untuk memastikan kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan Manajemen SPBE Kementerian.

7. Arsitektur SPBE Kementerian, dijelaskan dalam BAB V.

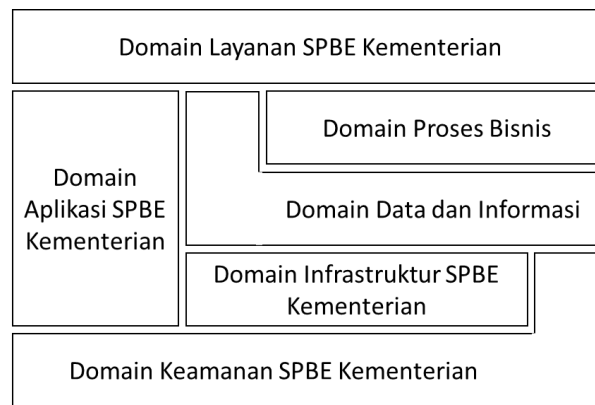
C. Arah Kebijakan Pembangunan SPBE Kementerian

Arah kebijakan pembangunan SPBE Kementerian menyelaraskan dengan arah kebijakan pembangunan SPBE nasional, yaitu untuk mendukung pembangunan pada sektor pemerintahan umum pada bagian urusan perencanaan pembangunan nasional.

BAB III

KERANGKA KERJA ARSITEKTUR SPBE KEMENTERIAN

Selaras dengan Arsitektur SPBE nasional, Arsitektur SPBE Kementerian memiliki pola agar dapat menghasilkan layanan digital pemerintah terintegrasi di Kementerian. Pola yang dilakukan yaitu dengan melakukan identifikasi layanan pemerintah terintegrasi di Kementerian dari domain Proses Bisnis, domain data dan informasi, serta domain Layanan SPBE Kementerian, yang selanjutnya akan didukung oleh aspek TIK melalui domain Aplikasi SPBE Kementerian, domain Infrastruktur SPBE Kementerian, dan Keamanan SPBE Kementerian.



Gambar 3.1. Kerangka Kerja Arsitektur SPBE Kementerian

A. Kerangka Kerja Arsitektur Proses Bisnis

1. Struktur Arsitektur Proses Bisnis

Domain arsitektur Proses Bisnis berupa fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintahan Kementerian merupakan penjelasan lebih rinci dari urusan pemerintahan di tingkat nasional. Sub fungsi pemerintahan merupakan penjelasan lebih rinci dari fungsi pemerintahan di Kementerian.

2. Keterkaitan Antar Domain

Domain arsitektur Proses Bisnis terdiri dari berbagai macam Proses Bisnis pemerintahan di Kementerian yang akan menghasilkan berbagai macam data dan informasi, serta akan mendefinisikan layanan pemerintah di Kementerian. Dengan demikian domain Proses Bisnis Kementerian berelasi langsung dengan domain Layanan SPBE Kementerian dan domain data dan informasi Kementerian.

B. Kerangka Kerja Arsitektur Data Elektronik dan Informasi

1. Struktur Arsitektur Data dan Informasi

Domain arsitektur data dan informasi terdiri dari data topik dan data sub topik Kementerian. Data topik merupakan data lebih rinci dari data tematik di tingkat nasional dan dihasilkan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Kementerian. Data sub topik merupakan data lebih rinci dari data topik Kementerian.

2. Keterkaitan Antar Domain

Domain arsitektur data dan informasi mempunyai relasi langsung dengan domain arsitektur Proses Bisnis, domain Layanan SPBE Kementerian, domain Aplikasi SPBE Kementerian dan domain arsitektur Infrastruktur SPBE Kementerian. Domain data dan informasi merupakan aset yang perlu diamankan melalui domain arsitektur Keamanan SPBE Kementerian.

C. Kerangka Kerja Arsitektur Layanan SPBE

1. Struktur Arsitektur Layanan SPBE

Domain arsitektur Layanan SPBE Kementerian terdiri dari kategori layanan dan sub kategori layanan. Kategori layanan, menjelaskan layanan pemerintah yang merupakan layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Kementerian. Kategori layanan terelasi dengan area layanan di tingkat nasional. Sub kategori layanan merupakan penjelasan lebih rinci dari kategori layanan Kementerian.

2. Keterkaitan Antar Domain

Domain arsitektur Layanan SPBE Kementerian mempunyai relasi langsung dengan domain bisnis proses Kementerian, domain data dan informasi Kementerian, dan domain Aplikasi SPBE Kementerian.

D. Kerangka Kerja Arsitektur Aplikasi SPBE

1. Struktur Arsitektur Aplikasi SPBE

Domain arsitektur Aplikasi SPBE Kementerian terdiri dari kategori aplikasi dan sub kategori aplikasi. Kategori aplikasi, menjelaskan aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Kementerian, sesuai

dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Kementerian. Kategori aplikasi terelasi dengan area aplikasi di tingkat nasional. Sub kategori aplikasi, menjelaskan lebih rinci dari kategori aplikasi Kementerian.

2. Keterkaitan Antar Domain

Domain arsitektur Aplikasi SPBE Kementerian mempunyai relasi langsung dengan domain Layanan SPBE Kementerian, domain data dan informasi, domain Infrastruktur SPBE Kementerian dan domain Keamanan SPBE Kementerian.

E. Kerangka Kerja Arsitektur Infrastruktur SPBE

1. Struktur Arsitektur Infrastruktur SPBE

Kementerian memetakan kebutuhan infrastruktur dalam membangun dan mengelola aplikasi sesuai dengan domain Aplikasi SPBE Kementerian, serta data dan informasi sesuai dengan domain data dan informasi Kementerian.

2. Keterkaitan Antar Domain

Domain arsitektur Infrastruktur SPBE Kementerian mempunyai relasi langsung dengan domain Aplikasi SPBE Kementerian, domain data dan informasi, dan domain Keamanan SPBE Kementerian.

F. Kerangka Kerja Arsitektur Keamanan SPBE

1. Struktur Arsitektur Keamanan SPBE

Kementerian akan mendefinisikan penerapan Keamanan SPBE Kementerian berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi dengan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

2. Keterkaitan Antar Domain

Domain arsitektur Keamanan SPBE Kementerian mempunyai relasi langsung dengan domain Aplikasi SPBE Kementerian, domain data dan informasi, dan domain Infrastruktur SPBE Kementerian.

BAB IV
REFERENSI ARSITEKTUR SPBE KEMENTERIAN

Arsitektur SPBE Kementerian disusun berdasarkan referensi yang ada di tingkat nasional, yaitu Referensi Arsitektur SPBE dan Metadata Arsitektur SPBE.

A. Referensi Arsitektur SPBE Kementerian

1. Referensi Proses Bisnis

Referensi Proses Bisnis Kementerian merupakan turunan dari referensi Proses Bisnis di tingkat nasional, yaitu Pemerintahan Umum (09), kode 09.05.

Tabel 4.1. Referensi Proses Bisnis Tingkat Nasional

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
09.05	Perencanaan Pembangunan Nasional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional termasuk di dalamnya pengawasan penyimpangan pembangunan, manajemen ekonomi makro, kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan, strategi pembangunan nasional, perencanaan pembangunan nasional, pengelolaan program kerja organisasi, penyusunan rencana induk, dan dukungan strategis program/kebijakan.

Selanjutnya berdasarkan referensi Proses Bisnis di tingkat nasional tersebut dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja, terdapat 3 (tiga) kelompok referensi Proses Bisnis Kementerian, yaitu i) Proses Bisnis Utama (09.05.01); ii) Proses Bisnis Manajemen (09.05.02); dan iii) Proses Bisnis Pendukung (09.05.03).

Tabel 4.2. Referensi Proses Bisnis Kementerian

Proses Bisnis Utama (09.05.01)		
Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
09.05.01.01	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait perencanaan pembangunan bidang ekonomi, termasuk didalamnya: <ul style="list-style-type: none">- pengoordinasian dan perumusan kerangka ekonomi makro;- pengoordinasian, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan; serta- pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di Bidang Ekonomi
09.05.01.02	Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Regional	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait perencanaan pembangunan bidang pengembangan regional, termasuk didalamnya: <ul style="list-style-type: none">- pengoordinasian dan perumusan kerangka ekonomi makro regional;- pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan; serta

		<ul style="list-style-type: none">- pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di Bidang Pengembangan Regional
09.05.01.03	Perencanaan Pembangunan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait perencanaan pembangunan bidang kemaritiman dan SDA, termasuk didalamnya: <ul style="list-style-type: none">- pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan; serta- pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
09.05.01.04	Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait perencanaan pembangunan bidang kependudukan dan ketenagakerjaan, termasuk didalamnya: <ul style="list-style-type: none">- pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan; serta- pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di

		Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan
09.05.01.05	Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia, masyarakat dan kebudayaan, termasuk didalamnya: <ul style="list-style-type: none">- pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan; dan- pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di Deputy Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan
09.05.01.06	Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana, termasuk didalamnya: <ul style="list-style-type: none">- pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan; dan- pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di Bidang Sarana dan

		Prasarana
09.05.01.07	Perencanaan Pembangunan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait perencanaan pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan, termasuk didalamnya: <ul style="list-style-type: none">- pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan; dan- pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan
09.05.01.08	Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait perencanaan pembangunan bidang pendanaan pembangunan, termasuk didalamnya: <ul style="list-style-type: none">- pengoordinasian, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan;- pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pendanaan pembangunan nasional; dan- pengembangan kerja sama

		pembangunan internasional
09.05.01.09	Perencanaan Pembangunan Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait perencanaan pembangunan bidang pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, termasuk didalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perumusan kebijakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional; dan - pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
Proses Bisnis Manajemen (09.05.02)		
Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
09.05.02.01	Manajemen Kelembagaan	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait manajemen kelembagaan, termasuk didalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organisasi dan tata laksana, hukum, dan kepegawaian; - pengawasan internal atas pelaksanaan administrasi umum dan keuangan di Kementerian; - pengawasan internal atas

		kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan di Kementerian
09.05.02.02	Manajemen Kinerja	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait manajemen kinerja, termasuk di dalamnya: <ul style="list-style-type: none">- organisasi dan tata laksana, hukum, dan kepegawaian;- pengawasan internal atas pelaksanaan administrasi umum dan keuangan di Kementerian;- pengawasan internal atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan di Kementerian
09.05.02.03	Manajemen Risiko	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait manajemen risiko, termasuk didalamnya: <ul style="list-style-type: none">- organisasi dan tata laksana, hukum, dan kepegawaian;- pengawasan internal atas pelaksanaan administrasi umum dan keuangan di Kementerian;- pengawasan internal atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan di Kementerian

Proses Bisnis Pendukung (09.05.03)		
Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
09.05.03.01	Dukungan Hubungan Masyarakat	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait dukungan hubungan masyarakat, termasuk di dalamnya: <ul style="list-style-type: none">- komunikasi dan publikasi, media massa, dan antarlembaga;- informasi publik;- kearsipan dan perpustakaan;- persidangan, keprotokolan, penyajian bahan, dan ketatausahaan pimpinan
09.05.03.02	Dukungan Hukum	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait dukungan hukum, termasuk didalamnya: <ul style="list-style-type: none">- penyusunan peraturan dan produk hukum;- pemberian pertimbangan dan nasehat hukum;- pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian bantuan hukum;- pelaksanaan pengkajian dan pengembangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum;- pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum;- pengelolaan data dan

		informasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum
09.05.03.03	Dukungan Organisasi dan Tata Laksana	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait dukungan organisasi dan tata laksana, termasuk didalamnya: <ul style="list-style-type: none">- pengoordinasian penyusunan rencana program/kegiatan/anggaran;- peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana;- kerja sama antarlembaga;- pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan bantuan luar negeri;- pengoordinasian kegiatan perencanaan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan/anggaran di Kementerian
09.05.03.04	Dukungan Kepegawaian	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait dukungan kepegawaian, termasuk didalamnya: <ul style="list-style-type: none">- perencanaan kebutuhan sumber daya manusia dan karir;- pengembangan sistem manajemen sumber daya

		<p>manusia;</p> <ul style="list-style-type: none">- perencanaan dan pelaksanaan pengembangan potensi, kompetensi, dan kapasitas pegawai;- administrasi kepegawaian
09.05.03.05	Dukungan TIK	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait dukungan TIK, termasuk didalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none">- pengelolaan <i>data center</i>;- pengelolaan sistem informasi manajemen;- pengelolaan TIK;- pengelolaan data, informasi dan pengetahuan terkait perencanaan pembangunan nasional; dan- pengembangan analitika data.
09.05.03.06	Dukungan Umum dan Keuangan	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait pelayanan umum dan keuangan, termasuk didalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none">- pelayanan umum;- pelayanan keuangan;- pengadaan dan layanan internal;- pengelolaan barang milik negara di Kementerian; dan- pengelolaan sarana dan prasarana.

09.05.03.07	Dukungan Analisis Kebijakan dan Kinerja	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait dukungan analisis kebijakan dan kinerja, termasuk didalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none">- melaksanakan analisis dan harmonisasi kebijakan atas pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian;- melaksanakan penyiapan agenda dan bahan, serta pendampingan substantif dan koordinasi tindak lanjut arahan atau kegiatan Menteri; dan- mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi analisis kinerja atas penugasan yang diberikan oleh Menteri.
09.05.03.08	Dukungan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia	<p>Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait dukungan pendidikan dan pelatihan, termasuk didalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none">- pembinaan Jabatan Fungsional Perencana;- program pendidikan dan pelatihan bidang perencanaan pembangunan nasional.

2. Referensi Data dan Informasi

Referensi data dan informasi Kementerian merupakan turunan dari referensi data dan informasi di tingkat nasional, yaitu Informasi Pemerintahan Umum (09), kode 09.05.

Tabel 4.3. Referensi Data dan Informasi Tingkat Nasional

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
09.05	Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Data yang mempresentasikan bidang perencanaan pembangunan nasional termasuk di dalamnya pengawasan penyimpangan pembangunan, manajemen ekonomi makro, kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan, strategi pembangunan nasional, perencanaan pembangunan nasional, pengelolaan program kerja organisasi, penyusunan rencana induk, dan dukungan strategis program/kebijakan.

Selanjutnya berdasarkan referensi data dan informasi tingkat nasional dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja, terdapat 3 (tiga) kelompok referensi data dan informasi Kementerian, yaitu i) Informasi Utama (09.05.01); ii) Informasi Manajemen (09.05.02); dan iii) Informasi Pendukung (09.05.03).

Tabel 4.4. Referensi Data dan Informasi Kementerian

Informasi Utama (09.05.01)		
Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
09.05.01.01	Data Perencanaan Pembangunan	Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan perencanaan

	Bidang Ekonomi	<p>pembangunan bidang ekonomi, termasuk didalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none">- pengoordinasian dan perumusan kerangka ekonomi makro;- pengoordinasian, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan; serta- pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di Bidang Ekonomi
09.05.01.02	Data Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Regional	<p>Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan perencanaan pembangunan bidang pengembangan regional, termasuk didalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none">- pengoordinasian dan perumusan kerangka ekonomi makro regional;- pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan; serta- pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di Bidang Pengembangan Regional
09.05.01.03	Data Perencanaan Pembangunan Bidang	<p>Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan perencanaan pembangunan bidang kemaritiman</p>

	Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	<p>dan SDA, termasuk didalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan; serta - pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
09.05.01.04	Data Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan	<p>Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan perencanaan pembangunan bidang kependudukan dan ketenagakerjaan, termasuk didalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan; serta - pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan
09.05.01.05	Data Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan	<p>Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia, masyarakat dan kebudayaan, termasuk didalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan; dan

		<ul style="list-style-type: none">- pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan
09.05.01.06	Data Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana	Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana, termasuk didalamnya: <ul style="list-style-type: none">- pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan; dan- pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di Bidang Sarana dan Prasarana
09.05.01.07	Data Perencanaan Pembangunan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan perencanaan pembangunan bidang hukum, pertahanan dan keamanan, termasuk didalamnya: <ul style="list-style-type: none">- pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan; dan- pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan di Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

09.05.0108	Data Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan	Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan perencanaan pembangunan bidang pendanaan pembangunan, termasuk didalamnya: <ul style="list-style-type: none">- pengoordinasian, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan;- pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pendanaan pembangunan nasional; dan- pengembangan kerja sama pembangunan internasional
09.05.01.09	Data Perencanaan Pembangunan Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan perencanaan pembangunan bidang pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, termasuk didalamnya: <ul style="list-style-type: none">- perumusan kebijakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional; dan- pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan

Informasi Manajemen (09.05.02)		
Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
09.05.02.01	Data Manajemen Kelembagaan	Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan manajemen kelembagaan, termasuk didalamnya: <ul style="list-style-type: none">- organisasi dan tata laksana, hukum, dan kepegawaian;- pengawasan internal atas pelaksanaan administrasi umum dan keuangan di Kementerian;- pengawasan internal atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan di Kementerian
09.05.02.02	Data Manajemen Kinerja	Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan manajemen kinerja, termasuk didalamnya : <ul style="list-style-type: none">- organisasi dan tata laksana, hukum, dan kepegawaian;- pengawasan internal atas pelaksanaan administrasi umum dan keuangan di Kementerian;- pengawasan internal atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan di Kementerian
09.05.02.03	Data Manajemen Risiko	Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan manajemen risiko, termasuk didalamnya: <ul style="list-style-type: none">- organisasi dan tata laksana, hukum, dan kepegawaian;

		<ul style="list-style-type: none">- pengawasan internal atas pelaksanaan administrasi umum dan keuangan di Kementerian;- pengawasan internal atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan di Kementerian
Informasi Pendukung (09.05.03)		
Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
09.05.03.01	Data Dukungan Hubungan Masyarakat	Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan dukungan hubungan masyarakat , termasuk didalamnya : <ul style="list-style-type: none">- komunikasi dan publikasi, media massa, dan antarlembaga;- informasi publik;- kearsipan dan perpustakaan;- persidangan, keprotokolan, penyajian bahan, dan ketatausahaan pimpinan
09.05.03.02	Data Dukungan Hukum	Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan dukungan hukum, termasuk didalamnya: <ul style="list-style-type: none">- penyusunan peraturan dan produk hukum;- pemberian pertimbangan dan nasehat hukum;- pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian bantuan hukum;- pelaksanaan pengkajian dan

		<p>pengembangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum;</p> <ul style="list-style-type: none">- pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum;- pengelolaan data dan informasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum
09.05.03.03	Data Dukungan Organisasi dan Tata Laksana	<p>Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan dukungan organisasi dan tata laksana, termasuk didalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none">- pengoordinasian penyusunan rencana program/kegiatan/anggaran;- peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana;- kerja sama antarlembaga;- pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan bantuan luar negeri;- pengoordinasian kegiatan perencanaan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan/anggaran di Kementerian
09.05.03.04	Data Dukungan Kepegawaian	<p>Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan dukungan kepegawaian, termasuk didalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none">- perencanaan kebutuhan sumber daya manusia dan karir;

		<ul style="list-style-type: none">- pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia;- perencanaan dan pelaksanaan pengembangan potensi, kompetensi, dan kapasitas pegawai;- administrasi kepegawaian
09.05.03.05	Data Dukungan TIK	Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan dukungan TIK, termasuk didalamnya: <ul style="list-style-type: none">- pengelolaan data <i>center</i>;- pengelolaan sistem informasi manajemen;- pengelolaan TIK;- pengelolaan data, informasi dan pengetahuan terkait perencanaan pembangunan nasional; dan- pengembangan analitika data.
09.05.03.06	Data Dukungan Umum dan Keuangan	Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan dukungan umum dan keuangan, termasuk didalamnya: <ul style="list-style-type: none">- pelayanan umum;- pelayanan keuangan;- pengadaan dan layanan internal;- pengelolaan barang milik negara di Kementerian; dan- pengelolaan sarana dan prasarana.

09.05.03.07	Data Dukungan Analisis Kebijakan dan Kinerja	Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan dukungan analisis kebijakan dan kinerja, termasuk didalamnya: <ul style="list-style-type: none">- melaksanakan analisis dan harmonisasi kebijakan atas pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian;- melaksanakan penyiapan agenda dan bahan, serta pendampingan substantif dan koordinasi tindak lanjut arahan atau kegiatan Menteri; dan- mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi analisis kinerja atas penugasan yang diberikan oleh Menteri.
09.05.03.08	Data Dukungan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia-SDM	Data topik dan data sub topik yang mempresentasikan dukungan pendidikan dan pelatihan, termasuk didalamnya: <ul style="list-style-type: none">- pembinaan Jabatan Fungsional Perencana;- program pendidikan dan pelatihan bidang perencanaan pembangunan nasional.

3. Referensi Layanan SPBE

Referensi Layanan SPBE Kementerian merupakan turunan dari referensi Layanan SPBE di tingkat nasional, yaitu Layanan Administrasi Pemerintahan (02), kode 02.03.

Tabel 4.5. Referensi Layanan SPBE Tingkat Nasional

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
02.03	Perencanaan Pembangunan Nasional	Kegiatan pelayanan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional termasuk di dalamnya pengawasan penyimpangan pembangunan, manajemen ekonomi makro, kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan, strategi pembangunan nasional, perencanaan pembangunan nasional, pengelolaan program kerja organisasi, penyusunan rencana induk, dan dukungan strategis program/kebijakan.

Selanjutnya berdasarkan referensi Layanan SPBE di tingkat nasional dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja, terdapat 3 (tiga) kelompok referensi Layanan SPBE Kementerian, yaitu i) Layanan Utama (02.03.01); ii) Layanan Manajemen (02.03.02); dan iii) Layanan Pendukung (02.03.03).

Tabel 4.6. Referensi Layanan SPBE Kementerian

Layanan Utama (02.03.01)		
Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
02.03.01.01	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Kegiatan pelayanan terkait perencanaan pembangunan bidang ekonomi, termasuk didalamnya: - pengoordinasian dan perumusan

		<p>kerangka ekonomi makro;</p> <ul style="list-style-type: none">- pengoordinasian, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan; serta- pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di Bidang Ekonomi
02.03.01.02	Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Regional	<p>Kegiatan pelayanan terkait perencanaan pembangunan bidang pengembangan regional, termasuk didalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none">- pengoordinasian dan perumusan kerangka ekonomi makro regional;- pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan; serta- pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di Bidang Pengembangan Regional
02.03.01.03	Perencanaan Pembangunan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	<p>Kegiatan pelayanan terkait perencanaan pembangunan bidang kemaritiman dan sumber daya alam, termasuk didalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none">- pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan; serta- pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kemaritiman dan sumber daya alam

02.03.01.04	Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Kegiatan pelayanan terkait perencanaan pembangunan bidang kependudukan dan ketenagakerjaan, termasuk didalamnya: <ul style="list-style-type: none">- pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan; serta- pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan
02.03.01.05	Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan	Kegiatan pelayanan terkait perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia, masyarakat dan kebudayaan, termasuk didalamnya: <ul style="list-style-type: none">- pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan; dan- pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan
02.03.01.06	Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana	Kegiatan pelayanan terkait Perencanaan Pembangunan bidang sarana dan prasarana, termasuk didalamnya: <ul style="list-style-type: none">- pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan; dan- pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang

		sarana dan prasarana
02.03.01.07	Perencanaan Pembangunan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	Kegiatan pelayanan terkait perencanaan pembangunan bidang hukum, pertahanan dan keamanan, termasuk didalamnya: <ul style="list-style-type: none">- pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan; dan- pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan
02.03.01.08	Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan	Kegiatan pelayanan terkait perencanaan pembangunan bidang pendanaan pembangunan, termasuk didalamnya: <ul style="list-style-type: none">- pengoordinasian, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan;- pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pendanaan pembangunan nasional; dan- pengembangan kerja sama pembangunan internasional
02.03.01.09	Perencanaan Pembangunan Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	Kegiatan pelayanan terkait perencanaan pembangunan bidang pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, termasuk didalamnya: <ul style="list-style-type: none">- perumusan kebijakan pemantauan,

		<p>evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
Layanan Manajemen (02.03.02)		
Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
02.03.02.01	Manajemen Kelembagaan	<p>Kegiatan pelayanan terkait manajemen kelembagaan, termasuk didalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organisasi dan tata laksana, hukum, dan kepegawaian; - pengawasan internal atas pelaksanaan administrasi umum dan keuangan di Kementerian; - pengawasan internal atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan di Kementerian
02.03.02.02	Manajemen Kinerja	<p>Kegiatan pelayanan terkait manajemen kinerja, termasuk didalamnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - organisasi dan tata laksana, hukum, dan kepegawaian; - pengawasan internal atas pelaksanaan administrasi umum dan keuangan di Kementerian; - pengawasan internal atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan di Kementerian
02.03.02.03	Manajemen Risiko	<p>Kegiatan pelayanan terkait manajemen risiko, termasuk didalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organisasi dan tata laksana, hukum, dan kepegawaian;

		<ul style="list-style-type: none"> - pengawasan internal atas pelaksanaan administrasi umum dan keuangan di Kementerian; - pengawasan internal atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan di Kementerian
Layanan Pendukung (02.03.03)		
02.03.03.01	Dukungan Hubungan Masyarakat	<p>Kegiatan pelayanan terkait dukungan hubungan masyarakat , termasuk didalamnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - komunikasi dan publikasi, media massa, dan antarlembaga; - informasi publik; - kearsipan dan perpustakaan; - persidangan, keprotokolan, penyajian bahan, dan ketatausahaan pimpinan
02.03.03.02	Dukungan Hukum	<p>Kegiatan pelayanan terkait dukungan hukum, termasuk didalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - penyusunan peraturan dan produk hukum; - pemberian pertimbangan dan nasehat hukum; - pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian bantuan hukum; - pelaksanaan pengkajian dan pengembangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum; - pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum;

		<ul style="list-style-type: none">- pengelolaan data dan informasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum
02.03.03.03	Dukungan Organisasi dan Tata Laksana	<p>Kegiatan pelayanan terkait dukungan organisasi dan tata laksana, termasuk didalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none">- pengoordinasian penyusunan rencana program/kegiatan/anggaran;- peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana;- kerja sama antarlembaga;- pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan bantuan luar negeri;- pengoordinasian kegiatan perencanaan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan/anggaran di Kementerian
02.03.03.04	Dukungan Kepegawaian	<p>Kegiatan pelayanan terkait dukungan kepegawaian, termasuk didalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none">- perencanaan kebutuhan sumber daya manusia dan karir;- pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia;- perencanaan dan pelaksanaan pengembangan potensi, kompetensi, dan kapasitas pegawai;- administrasi kepegawaian
02.03.03.05	Dukungan TIK	<p>Kegiatan pelayanan terkait dukungan TIK, termasuk didalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none">- pengelolaan data <i>center</i>;

		<ul style="list-style-type: none">- pengelolaan sistem informasi manajemen;- pengelolaan TIK;- pengelolaan data, informasi, dan pengetahuan terkait perencanaan pembangunan nasional; dan- pengembangan analitika data.
02.03.03.06	Dukungan Umum dan Keuangan	<p>Kegiatan pelayanan terkait dukungan umum dan keuangan, termasuk didalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none">- pelayanan umum;- pelayanan keuangan;- pengadaan dan layanan internal;- pengelolaan barang milik negara di Kementerian; dan- pengelolaan sarana dan prasarana.
02.03.03.07	Dukungan Analisis Kebijakan dan Kinerja	<p>Kegiatan pelayanan terkait dukungan analisis kebijakan dan kinerja, termasuk didalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none">- melaksanakan analisis dan harmonisasi kebijakan atas pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian;- melaksanakan penyiapan agenda dan bahan, serta pendampingan substantif dan koordinasi tindak lanjut arahan atau kegiatan Menteri; dan- mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi analisis kinerja atas penugasan yang diberikan oleh Menteri.

02.03.03.08	Dukungan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia	Kegiatan pelayanan terkait dukungan pendidikan dan pelatihan, termasuk didalamnya: - pembinaan Jabatan Fungsional Perencana; - program pendidikan dan pelatihan bidang perencanaan pembangunan nasional.
-------------	---	--

4. Referensi Aplikasi SPBE

Referensi Aplikasi SPBE Kementerian merupakan turunan dari referensi Aplikasi SPBE di tingkat nasional, yaitu Aplikasi Khusus (O2), kode 02.01 dan 02.02. Selanjutnya berdasarkan referensi Aplikasi SPBE di tingkat nasional dapat dibangun dan dikembangkan referensi Aplikasi SPBE Kementerian.

Tabel 4.7. Referensi Aplikasi SPBE Kementerian

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
02.01.01	Aplikasi Misi Tertentu Kementerian	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Kementerian untuk memenuhi kebutuhan khusus Kementerian, untuk mendukung misi tertentu. Berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk misi khusus Kementerian.
02.02.01	Aplikasi Fungsi Tertentu Kementerian	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Kementerian untuk memenuhi fungsi khusus Kementerian. Berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk fungsi khusus Kementerian.

5. Referensi Infrastruktur SPBE

Referensi Infrastruktur SPBE Kementerian merupakan turunan dari referensi infrastruktur SPBE di tingkat nasional, yaitu Fasilitas Komputasi (01), kode 01.01, 01.02, 01.03; Sistem Integrasi (02), kode 02.01, 02.02; dan Platform (03), kode 03.01, 03.02. Selanjutnya berdasarkan referensi infrastruktur SPBE di tingkat nasional dapat dibangun dan dikembangkan referensi infrastruktur SPBE Kementerian.

Tabel 4.8. Referensi Infrastruktur SPBE Kementerian

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Fasilitas Komputasi (01.01)		
01.01.01	Pusat Data Kementerian	Fasilitas yang digunakan keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan dan pemulihan.
01.02.01	Pusat Komputasi Kementerian	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu.
01.03.01	Pusat Kendali Kementerian	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkungan sistem.
Sistem Integrasi (02.01)		
02.01.01	Jaringan Intra Kementerian	Jaringan tertutup yang menghubungkan antara subsistem atau simpul jaringan dalam satu sistem/organisasi.
02.02.01	Sistem Penghubung Layanan Kementerian	Sistem layanan komunikasi untuk interaksi antar aplikasi dalam pertukaran data maupun layanan.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Platform (03.01)		
03.01.01	Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi Kementerian	Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan lingkungan kerja yang mendukung aplikasi.
03.02.01	Komputasi Awan Kementerian	Lingkungan dengan virtualisasi sebagai layanan platform berdasarkan teknologi <i>cloud</i> untuk lingkungan kerja aplikasi.

6. Referensi Keamanan SPBE

Referensi Keamanan SPBE Kementerian merupakan turunan dari referensi Keamanan SPBE di tingkat nasional, yaitu Standar Keamanan (01), kode 01.01, 01.02, 01.03; Penerapan Keamanan (02), kode 02.01, 02.02, 02.03, 02.04; dan Kelaikan Keamanan (03), kode 03.01, 03.02. Selanjutnya berdasarkan referensi Keamanan SPBE di tingkat nasional dapat dibangun dan dikembangkan referensi Keamanan SPBE Kementerian.

Tabel 4.9. Referensi Keamanan SPBE Kementerian

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Standar Keamanan (01.01)		
01.01.01	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE Kementerian	Standar atau Peraturan Kementerian yang digunakan untuk penerapan Keamanan SPBE Kementerian.
01.02.01	Standar Keamanan Internasional	Standar internasional yang digunakan sebagai pendukung dan untuk meningkatkan penerapan Keamanan SPBE Kementerian.
01.03.01	Regulasi Kementerian lainnya	Peraturan Kementerian lainnya selain dari peraturan terkait standar teknis dan prosedur

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		Keamanan SPBE Kementerian, yang saat ini menjadi acuan dalam penerapan Keamanan SPBE Kementerian.
Penerapan Keamanan (02.01)		
02.01.01	Kesadaran Keamanan SPBE Kementerian	Bentuk kegiatan di Kementerian untuk meningkatkan kesadaran Keamanan SPBE Kementerian.
02.02.02	Kerentanan Keamanan SPBE Kementerian	Bentuk kegiatan di Kementerian untuk mengidentifikasi kerentanan dan risiko Keamanan SPBE Kementerian.
02.02.03	Peningkatan Keamanan SPBE Kementerian	Bentuk kegiatan di Kementerian untuk meningkatkan Keamanan SPBE Kementerian.
02.02.04	Penanganan insiden Keamanan SPBE Kementerian	Bentuk kegiatan di Kementerian untuk menanggulangi, memulihkan dan memitigasi risiko insiden Keamanan SPBE Kementerian.
Kelaikan Keamanan (03.01)		
03.01.01	Kelaikan Keamanan Aplikasi SPBE Kementerian	Kelaikan keamanan terhadap Aplikasi SPBE Kementerian dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Kementerian dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar Aplikasi SPBE Kementerian yang telah mendapatkan rekomendasi

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		kelaikan keamanan.
03.02.01	Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Kementerian	Kelaikan keamanan terhadap Infrastruktur SPBE Kementerian dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Kementerian dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar Infrastruktur SPBE Kementerian yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.

B. Metadata Arsitektur SPBE Kementerian

Arsitektur SPBE Kementerian memiliki Model Metadata Arsitektur Kementerian yang disusun berdasarkan Model Metadata Arsitektur SPBE nasional. Metadata Arsitektur SPBE Kementerian merupakan model terstruktur untuk memudahkan penggambaran hubungan antar Domain Arsitektur SPBE Kementerian, dan memudahkan dalam mengelola, mengidentifikasi, dan melakukan pencarian, proses menemukan kembali terhadap domain arsitektur.

1. Metadata Proses Bisnis

Entitas metadata arsitektur Proses Bisnis berisi Informasi Elektronik mengenai urusan pemerintahan yang diselenggarakan Kementerian. Entitas metadata arsitektur Proses Bisnis mewakili referensi arsitektur Proses Bisnis Kementerian.

Tabel 4.10. Metadata Proses Bisnis Kementerian

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2	Nama Bisnis/Fungsi	Merupakan fungsi atau sub fungsi pemerintahan yang diselenggarakan yang mengacu pada tugas Unit Kerja di

No	Nama Atribut	Keterangan
		Kementerian.
3	Uraian Bisnis/Fungsi	Merupakan uraian dari fungsi atau sub fungsi pemerintahan yang diselenggarakan yang mengacu pada tugas Unit Kerja di Kementerian.
4	Kode Model Referensi	Merupakan kode model referensi SPBE yang sesuai dengan nama bisnis yang dipilih.
5	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE Kementerian terkait.

2. Metadata Data dan Informasi

Entitas metadata arsitektur data dan informasi terhubung dengan media penyimpanan dan selanjutnya digunakan dalam aplikasi.

Tabel 4.11. Metadata Data dan Informasi

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2	Nama Data	Merupakan data yang dikelola oleh Unit Kerja di Kementerian.
3	Uraian Data	Merupakan penjelasan atau keterangan dari data, terutama mengenai ciri khas dari data tersebut.
4	Tujuan Data	Merupakan penjelasan tujuan dari pemanfaatan data .
5	Kode Model Referensi Data	Merupakan pilihan kode model referensi data yang sesuai dengan data yang dipilih.
6	Sifat Data	Merupakan klasifikasi data berdasarkan

No	Nama Atribut	Keterangan
		kerahasiaan konten data .
7	Jenis Data	Merupakan klasifikasi data berdasarkan bentuk datanya.
8	Validitas Data	Merupakan tanggal berlakunya data.
9	Penanggung Jawab	Merupakan penanggung jawab dari data .
10	Interoperabilitas	Merupakan penjelasan apakah terdapat interoperabilitas data dengan data yang lain.
11	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE Kementerian terkait.
12	Disagreasi Data	Memecah kategori data besar menjadi subkategori yang lebih spesifik.

3. Metadata Layanan SPBE

Entitas metadata arsitektur Layanan SPBE Kementerian berisi informasi mengenai luaran atau hasil dari sebuah/beberapa fungsi dan sub fungsi pemerintahan di Kementerian. Entitas metadata arsitektur Layanan SPBE Kementerian berhubungan dengan arsitektur Aplikasi SPBE Kementerian sebagai perangkat yang memberikan layanan tersebut.

Tabel 4.12. Metadata Layanan SPBE Kementerian

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2	Nama Layanan	Merupakan nama dari layanan yang dihasilkan oleh Unit Kerja di Kementerian.
3	Tujuan Layanan	Merupakan penjelasan tujuan dari layanan.
4	Fungsi Layanan	Merupakan uraian penjelasan dari fungsi-

No	Nama Atribut	Keterangan
		fungsi yang terdapat dalam layanan.
5	Model Referensi Layanan	Merupakan kode model referensi SPBE Kementerian yang sesuai dengan nama layanan yang dipilih.
6	Unit Pelaksana	Merupakan Unit Kerja yang melaksanakan layanan.
7	Kementerian/ Lembaga terkait	Merupakan IPPD terkait dengan layanan.
8	Urusan Pemerintahan Terkait	Merupakan urusan pemerintahan yang terkait dengan layanan.
9	Target Layanan	Merupakan target pengguna layanan.
10	Metode Layanan	Merupakan model dari layanan.
11	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE Kementerian terkait.

4. Metadata Aplikasi SPBE

Entitas metadata arsitektur Aplikasi SPBE Kementerian menjadi entitas yang mempergunakan data dan informasi untuk menghasilkan layanan yang diinginkan. Aplikasi memerlukan sebuah *platform* yang dikelola melalui domain arsitektur infrastruktur SPBE Kementerian.

Tabel 4.13. Metadata Aplikasi SPBE Kementerian

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2	Nama Aplikasi	Nama aplikasi yang digunakan atau dimiliki.

No	Nama Atribut	Keterangan
3	Uraian Aplikasi	Berisi uraian atau deskripsi secara umum dari aplikasi.
4	Fungsi Aplikasi	Berisi keterangan fungsi dari aplikasi terhadap layanan yang didukung.
5	Kode Model Referensi SPBE	Kode model referensi yang terkait dengan aplikasi.
6	Layanan yang Didukung	Layanan yang didukung oleh aplikasi, pilihan layanan yang didukung didapat dari metadata arsitektur Layanan SPBE Kementerian.
7	Data yang Digunakan	Data yang disimpan pada media penyimpanan data, pilihan data yang digunakan didapat dari metadata arsitektur data dan informasi.
8	Luaran	Merupakan hasil-hasil yang diperoleh dari aplikasi yang dimiliki atau digunakan.
9	Basis Aplikasi	Basis dari aplikasi (desktop; web; cloud; atau mobile).
10	Server Aplikasi	Server yang digunakan oleh aplikasi, pilihan server yang digunakan didapat dari metadata perangkat keras server.
11	Tipe Lisensi Bahasa Pemrograman	Tipe lisensi dari aplikasi (<i>Open Source/Proprietary</i>).
12	Bahasa Pemrograman	Bahasa pemrograman yang digunakan oleh aplikasi.
13	Kerangka Pengembangan	Kerangka atau framework yang digunakan oleh aplikasi.
14	Basis Data	Basis data yang digunakan oleh aplikasi.

No	Nama Atribut	Keterangan
15	Unit Pengembang	Unit yang melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi.
16	Unit Operasional Teknologi	Unit yang melakukan operasional teknologi layanan.
17	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE Kementerian terkait.

5. Metadata Infrastruktur SPBE

Entitas metadata arsitektur Infrastruktur SPBE Kementerian merupakan metadata yang menginformasikan teknologi yang dipergunakan. Arsitektur Infrastruktur SPBE Kementerian dikelompokkan menjadi platform, sistem integrasi, dan fasilitas komputasi. Dalam penggunaannya, ketiga entitas metadata arsitektur Infrastruktur SPBE Kementerian saling terkait satu sama lain.

Tabel 4.14. Metadata Komputasi Awan

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2	Nama Government Cloud	Nama government cloud yang digunakan.
3	Deskripsi Government Cloud	Penjelasan dari government cloud yang digunakan.
4	Tipe Government Cloud	Jenis dari government cloud yang digunakan (PaaS, IaaS, SaaS, BDaaS, dan SecaaS).
5	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari government cloud yang digunakan (milik sendiri, milik instansi pemerintah lain, milik BUMN, atau milik pihak ketiga).

No	Nama Atribut	Keterangan
6	Nama Pemilik	Nama pemilik government cloud yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
7	Biaya Layanan	Biaya yang dikeluarkan pemilik untuk layanan government cloud.
8	Unit Pengembang Government Cloud	Unit yang melakukan pembangunan dan pengembangan government cloud.
9	Unit Operasional Government Cloud	Unit operasional government cloud yang digunakan.
10	Jangka Waktu Pelayanan	Periode penggunaan layanan government cloud.
11	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE Kementerian terkait.

Tabel 4.15. Metadata Perangkat Lunak Platform

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2	Nama Perangkat Lunak	Nama perangkat lunak yang digunakan.
3	Deskripsi Perangkat Lunak	Penjelasan dari perangkat lunak yang digunakan.
4	Tipe Perangkat Lunak	Jenis dari perangkat lunak yang digunakan (sistem operasi, sistem utilitas, atau sistem database).
5	Jenis Sistem Operasi (jika pilihan adalah 1 pada No. 3)	(Dos, Unix, MacOS, Windows, Networking OS, atau Lainnya)

No	Nama Atribut	Keterangan
6	Jenis Sistem Utilitas (jika pilihan adalah 2 pada No. 3)	
7	Jenis Sistem Database (jika pilihan adalah 3 pada No. 3)	
8	Jenis Lisensi	Jenis lisensi perangkat lunak yang digunakan (lisensi seumur hidup, lisensi periodik, atau kode sumber terbuka).
9	Nama Pemilik Lisensi	Nama pemilik dari lisensi perangkat lunak.
10	Validitas Lisensi Perangkat Lunak	Penjelasan validitas dari lisensi perangkat lunak yang digunakan.
11	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE Kementerian terkait.

Tabel 4.16. Metadata Perangkat Keras Server

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2	Nama Server	Nama dari perangkat server yang digunakan.
3	Deskripsi Server	Berisi deskripsi dari perangkat server yang digunakan.
4	Jenis Penggunaan Server	Jenis penggunaan dari server yang digunakan, jenis penggunaan tersebut antara lain web server, mail server, aplikasi, database. file server, active directory, dan keamanan informasi.

No	Nama Atribut	Keterangan
5	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari server yang digunakan (milik sendiri, milik instansi pemerintah lain, milik BUMN, atau milik pihak ketiga).
6	Nama Pemilik	Nama pemilik server yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
7	Unit Pengelola Server	Unit pengelola server yang digunakan.
8	Lokasi Perangkat Keras Server	Lokasi dari perangkat server yang digunakan, pilihan lokasi didapat dari metadata fasilitas.
9	Perangkat Lunak yang Digunakan	Perangkat lunak yang digunakan oleh server, pilihan perangkat lunak didapat dari metadata perangkat lunak.
10	Kapasitas Memori	Kapasitas memori atau Random Access Memory (RAM) yang digunakan oleh server, satuan kapasitas memori dalam GigaByte (GB).
11	Jenis Teknologi Prosesor	Jenis teknologi prosesor yang digunakan oleh server, a.l.: High End, Mid End, Low End.
12	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Jumlah kapasitas penyimpanan pada server, satuan kapasitas penyimpanan dalam Gigabyte (GB).
13	Teknik Penyimpanan	Teknik penyimpanan yang digunakan pada server (RAID 1, RAID 3, RAID 5, atau non-RAID).
14	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE kementerian terkait.

Tabel 4.17. Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2	Nama Data Storage	Nama dari data storage yang digunakan.
3	Deskripsi Data Storage	Berisi deskripsi dari data storage yang digunakan.
4	Data Storage yang Digunakan	Data yang disimpan pada media penyimpanan data, pilihan data yang digunakan didapat dari metadata data dan informasi.
5	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari data storage yang digunakan (milik sendiri, milik instansi pemerintah lain, milik BUMN, atau milik pihak ketiga).
6	Nama Pemilik	Nama pemilik data storage yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
7	Unit Pengelola Data Storage	Unit pengelola data storage yang digunakan.
8	Lokasi Data Storage	Lokasi dari data storage yang digunakan, pilihan lokasi didapat dari metadata fasilitas
9	Perangkat Lunak yang Digunakan	Perangkat lunak yang digunakan oleh data storage, pilihan perangkat lunak didapat dari metadata perangkat lunak.
10	Kapasitas Penyimpanan	Jumlah kapasitas penyimpanan pada data storage, satuan kapasitas penyimpanan dalam Gigabyte (GB).
11	Metode Akses Data	Metode akses data sharing yang digunakan pada data storage (Direct Attached

No	Nama Atribut	Keterangan
	Sharing	Storage/DAS atau Network Attached Storage/NAS).
12	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE kementerian terkait.

Tabel 4.18. Metadata Perangkat Keras Jaringan

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2	Nama Network/ Communication Device	Nama Network/Communication Device yang digunakan.
3	Deskripsi Network/ Communication Device	Penjelasan dari Network/Communication Device yang digunakan.
4	Tipe Network/ Communication Device	Jenis dari Network/Communication Device yang digunakan (Switch L2, Switch L3, Switch L4, Switch L7, Multilayer Switch, Router, Wireless equipment, atau Transmission equipment).
5	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari network/communication device yang digunakan (milik sendiri, milik instansi pemerintah lain, milik BUMN, atau milik pihak ketiga).
6	Nama Pemilik	Nama pemilik network/communication device yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
7	Unit Pengelola Network/ Communication Device	Unit pengelola network/communication device yang digunakan.

No	Nama Atribut	Keterangan
8	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE kementerian terkait.

Tabel 4.19. Metadata Perangkat Keras Keamanan

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2	Nama Security Device	Nama dari security device yang digunakan.
3	Deskripsi Security Device	Penjelasan dari security device yang digunakan.
4	Tipe Security Device	Jenis dari security device yang digunakan (Firewall, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System, Proxy, Load Balancer, Wireless intrusion prevention and detection system, Unified Threat Management, atau Network Access Control).
5	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari security device yang digunakan (milik sendiri, milik instansi pemerintah lain, milik BUMN, atau milik pihak ketiga).
6	Nama Pemilik	Nama pemilik security device yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
7	Unit Pengelola Security Device	Unit pengelola security device yang digunakan.
8	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE kementerian terkait.

Tabel 4.20. Metadata Perangkat Keras Periferal

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2	Nama Periferal	Nama periferal yang digunakan.
3	Deskripsi Periferal	Penjelasan dari periferal yang digunakan.
4	Tipe Periferal	Jenis dari periferal yang digunakan (input, output, input/output).
5	Lokasi penempatan Periferal	(mengacu pada metadata fasilitas)
6	Unit Pengelola Network/ Communication Device	Unit pengelola periferal yang digunakan
7	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE kementerian terkait.

Tabel 4.21. Metadata Sistem Penghubung Layanan Kementerian

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2	Nama Sistem Penghubung	Nama sistem penghubung yang digunakan atau dimiliki.
3	Deskripsi Sistem Penghubung	Berisi deskripsi dari sistem penghubung yang digunakan.
4	Jenis Sistem Penghubung	Jenis sistem penghubung yang digunakan (Sistem penghubung pemerintah / sistem penghubung non pemerintah).
5	Kepemilikan	Status kepemilikan dari sistem penghubung

No	Nama Atribut	Keterangan
		yang digunakan (milik sendiri, milik instansi pemerintah lain, milik BUMN, atau milik pihak ketiga).
6	Nama Pemilik	Nama pemilik data storage yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
7	Nama Jaringan Intra yang Digunakan	Nama Jaringan Intra yang digunakan oleh sistem penghubung, pilihan Jaringan Intra didapat dari metadata Jaringan Intra pemerintah.
8	Aplikasi yang Dihubungkan	Aplikasi yang dihubungkan oleh sistem penghubung, pilihan aplikasi didapat dari metadata aplikasi.
9	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE kementerian terkait.

Tabel 4.22. Metadata Jaringan Intra Kementerian

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2	Nama Jaringan	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
3	Deskripsi Jaringan	Merupakan penjelasan dari jaringan.
4	Jenis Jaringan	Merupakan jenis jaringan yang digunakan.
5	Kepemilikan	Merupakan pemilik dari jaringan.
6	Nama Pemilik	Merupakan nama dari pemilik jaringan.

No	Nama Atribut	Keterangan
7	Unit Kerja Pengelola Jaringan	Merupakan Unit Kerja pengelola jaringan.
8	Bandwidth	Merupakan jumlah bandwidth yang tersedia.
9	Tipe Media Jaringan	Merupakan tipe dari media jaringan.
10	Media Lainnya	Merupakan tipe dari media jaringan.
11	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE kementerian terkait.

Tabel 4.23. Metadata Fasilitas Komputasi

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2	Nama Fasilitas	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
3	Kode Model Referensi SPBE	Merupakan kode model referensi SPBE sesuai dengan fasilitas yang dipilih.
4	Bandwidth Intranet	Merupakan jumlah bandwidth internet yang tersedia selama 1 tahun.
5	Bandwidth Internet	Merupakan jumlah bandwidth internet yang tersedia selama 1 tahun.
6	Lokasi	Merupakan lokasi dari fasilitas.
7	Kepemilikan	Merupakan unit pemilik dari fasilitas.
8	Unit Kerja Penanggung jawab	Merupakan Unit Kerja yang bertanggung jawab atas fasilitas.
9	Klasifikasi Tier Fasilitas	Merupakan klasifikasi tier fasilitas.

No	Nama Atribut	Keterangan
10	Sistem Pengamanan Fasilitas	Merupakan tipe pengamanan fasilitas.
11	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada metadata Arsitektur SPBE kementerian terkait.

6. Metadata Keamanan SPBE

Entitas metadata arsitektur Keamanan SPBE Kementerian merupakan metadata yang menginformasikan pengamanan domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur Aplikasi SPBE Kementerian, serta domain arsitektur Infrastruktur SPBE Kementerian yang direpresentasikan dalam bentuk metadata manajemen keamanan.

Tabel 4.24. Metadata Manajemen Keamanan

No	Nama Atribut	Keterangan
1	Jenis Standar Keamanan	Jenis standar keamanan yang diacu dan menjadi prioritas Kementerian diantaranya: 1. standar dan/atau Peraturan terkait teknis dan prosedur Keamanan SPBE; 2. standar internasional terkait keamanan informasi; atau regulasi lainnya.
2	Keterangan Nama Standar	Nama dari jenis standar keamanan yang diacu dan menjadi prioritas Kementerian.
3	Hasil Audit Keamanan SPBE	Hasil dari pelaksanaan audit Keamanan SPBE Kementerian untuk Aplikasi SPBE Kementerian dan Infrastruktur SPBE Kementerian yang terdiri dari: 1. belum/tidak dilaksanakan; 2. memadai; 3. perlu peningkatan; dan 4. tidak memadai. (Ket: Untuk data dan informasi tidak

No	Nama Atribut	Keterangan
		dilakukan Audit Keamanan)
4	Tanggal Pelaksanaan Audit	Tanggal penyerahan laporan audit Keamanan SPBE Kementerian terbaru untuk Aplikasi SPBE Kementerian dan Infrastruktur SPBE Kementerian yang bersesuaian. (Ket: Untuk data dan informasi tidak dilakukan audit keamanan, atribut ini tidak terbuka bila atribut audit Keamanan SPBE dijawab dengan “belum/tidak dilaksanakan”)
5	Penerapan Keamanan	Program kerja atau kegiatan Keamanan SPBE Kementerian yang dilaksanakan oleh Kementerian sebagai upaya dalam meminimalkan dampak risiko Keamanan SPBE Kementerian. Program kerja atau kegiatan Keamanan SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud paling sedikit meliputi: 1. edukasi kesadaran Keamanan SPBE; 2. penilaian kerentanan Keamanan SPBE; 3. peningkatan Keamanan SPBE; dan penanganan insiden Keamanan SPBE.
6	Kelaikan Keamanan	Pemberian pertimbangan kelaikan keamanan yang telah dilaksanakan terhadap pengendalian data dan informasi, persyaratan keamanan Aplikasi Umum SPBE Kementerian, dan persyaratan keamanan Infrastruktur SPBE Kementerian.
7	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE kementerian terkait.

7. Metamodel Arsitektur SPBE Kementerian

Sesuai dengan Domain Arsitektur SPBE Kementerian, maka setiap domain memiliki Metadata Arsitektur SPBE Kementerian, dengan relasi sebagai berikut:

- a. Domain arsitektur Proses Bisnis dengan metadata arsitektur Proses Bisnis;
- b. Domain arsitektur data dan informasi dengan metadata arsitektur data dan informasi;
- c. Domain arsitektur Layanan SPBE Kementerian dengan metadata arsitektur Layanan SPBE Kementerian;
- d. Domain arsitektur Aplikasi SPBE Kementerian dengan metadata arsitektur Aplikasi SPBE Kementerian;
- e. Domain arsitektur Infrastruktur SPBE Kementerian dengan metadata sebagai berikut:

1) Metadata platform terdiri dari:

- metadata komputasi awan;
- metadata perangkat lunak platform;
- metadata perangkat keras server;
- metadata perangkat keras media penyimpanan;
- metadata perangkat keras jaringan;
- metadata perangkat keras keamanan;
- metadata perangkat keras periferai;

2) Metadata sistem integrasi terdiri dari:

- metadata Sistem Penghubung Layanan pemerintah;
- metadata Jaringan Intra pemerintah;

3) Metadata fasilitas komputasi.

8. Domain arsitektur Keamanan SPBE Kementerian dengan metadata manajemen keamanan.

BAB V

ARSITEKTUR SPBE KEMENTERIAN

A. Domain Arsitektur SPBE Kementerian 2022 - 2026

Domain Arsitektur SPBE Kementerian yang ditargetkan akan dicapai sampai dengan tahun 2026 merupakan substansi Arsitektur SPBE Kementerian yang memuat seluruh target pencapaian Arsitektur SPBE Kementerian di keenam domain Arsitektur SPBE Kementerian seperti yang dijelaskan di bawah ini:

1. Domain Arsitektur Proses Bisnis

Substansi arsitektur pada domain arsitektur Proses Bisnis Kementerian yang menjadi target arsitektur sampai dengan tahun 2026 adalah:

- a. Proses Bisnis Utama (09.05.01)
- b. Proses Bisnis Manajemen (09.05.02)
- c. Proses Bisnis Pendukung (09.05.03)

2. Domain Arsitektur Data dan Informasi

Substansi arsitektur pada domain arsitektur data dan informasi Kementerian yang menjadi target arsitektur sampai dengan tahun 2026 adalah:

- a. Informasi Utama (09.05.01)
- b. Informasi Manajemen (09.05.02)
- c. Informasi Pendukung (09.05.03)

3. Domain Arsitektur Layanan SPBE

Substansi arsitektur pada domain Layanan SPBE Kementerian yang menjadi target arsitektur sampai dengan tahun 2026 adalah:

- a. Layanan Utama (02.03.01)
- b. Layanan Manajemen (02.03.02)
- c. Layanan Pendukung (02.03.03)

4. Domain Arsitektur Aplikasi SPBE

Substansi arsitektur pada domain Aplikasi SPBE Kementerian yang menjadi target arsitektur sampai dengan tahun 2026 adalah:

- a. Aplikasi Misi Tertentu Kementerian (02.01.01)
- b. Aplikasi Fungsi Tertentu Kementerian (02.02.01)

5. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE

Substansi arsitektur pada domain Infrastruktur SPBE Kementerian yang menjadi target arsitektur sampai dengan tahun 2026 adalah:

- a. Fasilitas Komputasi (O1.01)
- b. Sistem Integrasi (O2.01)
- c. Platform (O3.01)

6. Domain Arsitektur Keamanan SPBE

Substansi arsitektur pada domain Keamanan SPBE Kementerian yang menjadi target arsitektur sampai dengan tahun 2026 adalah:

- a. Standar Keamanan (O1.01)
- b. Penerapan Keamanan (O2.01)
- c. Kelaikan Keamanan (O3.01)

B. Penerapan Arsitektur SPBE Kementerian 2022 – 2026

Dalam rangka mendukung berbagai rencana pembangunan nasional tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 yang merupakan tujuan (to-be) dari berbagai pembangunan nasional, maka pelaksanaan tata kelola pemerintahan Kementerian dengan penerapan Arsitektur SPBE Kementerian diharapkan dapat menjadi katalisator. Arsitektur SPBE Kementerian diharapkan juga dapat berperan sebagai fungsi integrasi dan harmonisasi tata kelola pemerintahan berbasis SPBE.

Selaras dengan pelaksanaan rencana inisiatif strategis pada Rencana Induk SPBE Nasional dan pelaksanaan berbagai proyek prioritas strategis, maka ditargetkan hingga tahun 2026 penerapan Arsitektur SPBE Kementerian dapat dilakukan pada kegiatan prioritas yang telah diidentifikasi, yaitu pada bagian tematik layanan administrasi pemerintah (G2G dan G2E) dalam rangka mendukung terwujudnya *New Ways of Working* (NwoW) berbasis digital pada IKN baru.

Penerapan Arsitektur SPBE Kementerian yang ditargetkan sampai dengan tahun 2026 merupakan bentuk transformasi digital Kementerian, yang dilakukan dengan melakukan berbagai transformasi, baik transformasi Proses Bisnis hingga transformasi teknologi. Transformasi tersebut dilakukan sesuai arah kebijakan Arsitektur SPBE nasional yakni pada bidang pembangunan pemerintahan umum.

C. Peta Rencana Strategis SPBE Kementerian

Peta rencana strategis SPBE Kementerian berisi berbagai inisiatif strategis yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Kementerian. Secara garis besar, peta rencana strategis SPBE Kementerian terbagi menjadi 2 (dua) tahapan yakni:

1. Tahapan pembangunan fondasi SPBE Kementerian (2022 s.d. 2023), difokuskan pada penguatan Tata Kelola SPBE Kementerian, Infrastruktur SPBE Kementerian sebagai fondasi pelaksanaan SPBE Kementerian yang terpadu dan menyeluruh;
2. Tahapan pengembangan SPBE Kementerian (2024 s.d. 2026), difokuskan pada peningkatan kualitas SPBE Kementerian yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna layanan pemerintah tingkat Kementerian.

Inisiatif strategis SPBE Kementerian dalam penyelenggaraan Arsitektur SPBE Kementerian dideskripsikan pada area Tata Kelola SPBE Kementerian, Layanan SPBE Kementerian, TIK di Kementerian, dan Sumber Daya Manusia di Kementerian.

Tabel 5.1. Peta Rencana Strategis SPBE Kementerian

No	Inisiatif Strategis	Keluaran	Target Waktu	Penanggung Jawab
Tata Kelola SPBE Kementerian				
1	Pembangunan Arsitektur SPBE Kementerian	Termanfaatkannya Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional	2022 - 2026	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
		Arsitektur SPBE Kementerian	2022 - 2026	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
2	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE Kementerian	Tim Koordinasi SPBE Kementerian	2022 - 2026	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
3	Rencana dan Anggaran berbasis Arsitektur SPBE	Rencana dan Anggaran SPBE	2022 - 2026	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
4	Penguatan Kebijakan SPBE Kementerian	Kebijakan SPBE Kementerian	2022 - 2026	Biro Perencanaan, Organisasi dan

No	Inisiatif Strategis	Keluaran	Target Waktu	Penanggung Jawab
				Tata Laksana
5	Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE Kementerian	Evaluasi SPBE Kementerian	2022 - 2026	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
		Audit TIK Kementerian	2022 - 2026	Inspektorat Bidang Administrasi Umum dan Bidang Kinerja Kelembagaan
6	Penyelenggaraan Manajemen Perubahan SPBE Kementerian	Manajemen Perubahan SPBE	2022 - 2026	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
Layanan SPBE Kementerian				
1	Survei Pengguna SPBE Kementerian	Survei Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna SPBE Kementerian	2022 - 2026	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
2	Portal Pelayanan Publik Kementerian yang Terintegrasi	Integrasi Proses Bisnis Pelayanan Publik Kementerian dengan Pemerintah Pusat.	2022 - 2026	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
		Pemanfaatan Portal Pelayanan Publik Pemerintah Pusat	2022 - 2026	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
3	Portal Pelayanan Administrasi Kementerian yang Terintegrasi	Integrasi Proses Bisnis Pelayanan Administrasi Kementerian dengan	2022 - 2026	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana

No	Inisiatif Strategis	Keluaran	Target Waktu	Penanggung Jawab
		Pemerintah Pusat		
		Pemanfaatan Aplikasi Umum Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi	2022 - 2026	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
		Pemanfaatan Aplikasi Umum Kepegawaian	2022 - 2026	Biro Sumber Daya Manusia
		Pemanfaatan Aplikasi Umum Kearsipan	2022 - 2026	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
		Pemanfaatan Aplikasi Umum Pengaduan Publik	2022 - 2026	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
		Pemanfaatan Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan	2022 - 2026	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
		Pemanfaatan Aplikasi Umum Layanan Administrasi lainnya yang ditetapkan secara	2022 - 2026	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

No	Inisiatif Strategis	Keluaran	Target Waktu	Penanggung Jawab
		Nasional		
4	Penyelenggaraan Manajemen Layanan SPBE Kementerian	Manajemen Layanan SPBE Kementerian, dan Pemanfaatan Portal Pusat Layanan	2022 - 2026	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian				
1	Penyediaan Pusat Data Kementerian	Integrasi Pusat Data Kementerian dengan Pusat Data Nasional	2022 - 2026	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
2	Penyediaan Jaringan Intra Kementerian	Jaringan Intra Kementerian	2022 - 2026	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
		Terkoordinasinya Jaringan Intra Kementerian dengan Pusat Pengendalian Jaringan Intra Pemerintah	2022 - 2026	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
3	Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Kementerian	Terintegrasinya Sistem Penghubung Layanan Kementerian dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	2022 - 2026	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

No	Inisiatif Strategis	Keluaran	Target Waktu	Penanggung Jawab
4	Penyediaan Akses Berkualitas Terhadap Layanan SPBE Kementerian	Penyediaan Jaringan Internet Yang Berkualitas	2022 - 2026	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
5	Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi Layanan Berbagi Pakai	<i>Cloud Service</i> Kementerian, <i>Repository</i> Aplikasi Khusus	2022 - 2026	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
6	Pembangunan Portal Data Elektronik Kementerian	Portal Data Elektronik Kementerian	2022 - 2026	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
		Integrasi Portal Data Elektronik Kementerian dengan Portal Data Nasional	2022 - 2026	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
7	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Kementerian	Manajemen Keamanan Informasi Kementerian	2022 - 2026	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
		Teknologi Keamanan Informasi Kementerian	2022 - 2026	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
		Budaya Keamanan Informasi Kementerian	2022 - 2026	Seluruh Unit Kerja di Kementerian
8	Pengembangan Teknologi Analitika Data Elektronik Untuk Pengambilan Keputusan yang Cepat	Teknologi Analitika Data Elektronik	2022 - 2026	Pusat Data Elektronik dan Informasi Perencanaan Pembangunan

No	Inisiatif Strategis	Keluaran	Target Waktu	Penanggung Jawab
	dan Akurat	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pelaksana Analitika Data	2022 - 2026	Biro Sumber Daya Manusia
		Penerapan Analitika Data	2022 - 2026	Seluruh Unit Kerjadi Kementerian
9	Penyelenggaraan Manajemen TIK SPBE Kementerian	Manajemen Risiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi SPBE, Manajemen Aset TIK.	2022 - 2026	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Sumber Daya Manusia Kementerian				
1	Promosi Literasi SPBE Kementerian	Pelatihan dan Sosialisasi	2022 - 2026	Biro Sumber Daya Manusia
2	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE Kementerian	Termanfaatkannya Standar Kompetensi Teknis SPBE	2022 - 2026	Biro Sumber Daya Manusia
		Tersedianya Jabatan Fungsional yang Terkait SPBE	2022 - 2026	Biro Sumber Daya Manusia
		Termanfaatkannya Pola Remunerasi Bidang SPBE	2022 - 2026	Biro Sumber Daya Manusia dan Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana

No	Inisiatif Strategis	Keluaran	Target Waktu	Penanggung Jawab
		Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi	2022 - 2026	Biro Sumber Daya Manusia
3	Forum Kolaborasi SPBE	Termanfaatkannya Forum Kolaborasi SPBE Nasional	2022 - 2026	Biro Sumber Daya Manusia
4	Penyelenggaraan Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE Kementerian	Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE	2022 - 2026	Biro Sumber Daya Manusia

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati